

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RINGKASAN	viii
SUMARY.....	xvi
KATA PENGANTAR	xix
GLOSARIUM.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	25

1.3. Tujuan Penelitian.....	25
1.4 Manfaat Penelitian.....	26
1.5. Kerangka Pemikiran	27
1.6. Kerangka Teori.....	27
1.6.1. <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum.....	27
1.6.2. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila.....	33
1.6.3. <i>Grand Theor</i> : Teori Keadilan Yang Bermartabat	38
1.6.4. <i>Middle Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum.....	72
1.6.5. <i>Middle Theory</i> : Teori <i>Good Government</i>	73
1.6.6. <i>Middle Theory</i> : Teori Penegakan Hukum	79
1.6.7. <i>Applied Theory</i> : Teori Sistem Hukum	89
1.6.8. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Pembangunan	93
1.6.9. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial ...	99
1.6.10. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif	101
1.7. Kerangka Konseptual	106
1.7.1. Pelayanan Publik di Indonesia	106
1.7.2. Badan Pertanahan Nasional.....	127
1.7.3. Pendaftaran Tanah.....	141

1.8. Metode Penelitian.....	154
1.9. Sistematika Penulisan.....	164
1.10. Orisinalitas.....	164
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	177
2.1. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik	177
2.2. Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	208
2.3. Keterbukaan Informasi Publik.....	220
2.4. Pendaftaran Tanah	223
BAB III PRINSIP-PRINSIP PENDAFTARAN TANAH.....	237
BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN PELAYANAN PUBLIK.....	256
4.1. Tanah	256
4.2. Sumber Daya Manusia	275
4.3. Minim Infrastruktur Pertanahan	282
4.4. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	285
4.5. Pembangunan Kantor Pertanahan Bergerak.....	287
4.6. Peraturan Perundangan Pertanahan	289
4.7. Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan.....	291
4.8. Tanah Terlantar	295
4.9. Anggaran Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	297

BAB V REKONSTRUKSI PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN TANAH BERBASIS NILAI KEADILAN	299
5.1. Pendaftaran Tanah di negara lain	299
5.2. Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik	323
5.3. Konstruksi Hukum Pelayanan Publik Pertanahan di Indonesia	353
5.4. Rekonstruksi Hukum Pelayanan Publik Pertanahan di Indonesia.....	367
BAB VI PENUTUP	397
6.1. Kesimpulan.....	397
6.2. Implikasi Kajian Desertasi	399
6.3. Saran	404
DAFTAR PUSTAKA	405